BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian serta menganalisis pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di Desa Tatah Pemangkih, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Tatah Pemangkih jika dilihat dari segi rukun gadai atau dari segi syarat sah terjadinya perjanjian gadai maka pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan rukun gadai dalam hukum Islam dan hukum Positif. Akan tetapi, jika dilihat dari segi syarat gadai maka pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa ini terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai, yaitu mengenai syarat *marhûn* atau barang jaminan, syarat utang atau *marhûn bih*, dan pernyataan kesepakatan atau *shîgat ijab qabul*. Tidak ada batasan waktu untuk melunasi utang, selama pihak *râhin* atau penggadai belum melunasi utangnya, maka pihak *murtahin* berhak mengambil manfaat dari barang jaminan yakni berupa tanah sawah tersebut dan ini tidak sesuai dengan hukum Positif dan hukum Islam. Apabila *râhin* meninggal dan belum melunasi utangnya, maka ahli waris keluarganya yang menjadi penanggung jawabnya untuk melunasi utang tersebut. Namun, masyarakat Desa Tatah Pemangkih sudah melakukan gadai tanah sawah ini sejak dulu kala dan masih menganut sistem atau hukum adat. Pelaksanaan

gadai tanah sawah dalam masyarakat Desa Tatah Pemangkih hanya dilakukan secara kekeluargaan saja, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintah dan tidak ada pencatatan tertulis resmi hitam di atas putih dan dicukupkan dengan lisan saja. Pemanfaatan tanah sawah yang digadaikan di sini lebih cenderung mengikuti hukum adat yang berlaku dan hal ini masih ada sejalan dengan pendapat ulama Malikiyah dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat Desa Tatah Pemangkih melakukan transaksi gadai tanah sawah, yaitu faktor ekonomi, kebutuhan biaya kesehatan keluarga, akses modal usaha, lingkungan dan sosial.
3. Akibat dari adanya pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Tatah Pemangkih ini adalah berdampak positif berupa sikap saling bantu membantu, mempererat hubungan kekeluargaan dan tidak melewati proses yang rumit. Selain itu, pelaksanaan ini juga berdampak negatif berupa kerugian yang berlipat ganda bagi pihak pemberi gadai atau *râhin*, tertahan dari memanfaatkan tanah sendiri dan melanggar norma hukum.

B. Saran

Setelah penulis menemukan beberapa inkonsistensi dalam pelaksanaan gadai tanah sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Tatah Pemangkih dengan ketentuan hukum Positif dan hukum Islam, penulis berharap dan merekomendasikan:

1. Diharapkan para ulama dan aparaturnya Desa setempat melakukan peninjauan kembali guna menyesuaikan pelaksanaan gadai di Desa Tatah Pemangkih agar sesuai dengan kaidah hukum Positif dan hukum Islam.
2. Diharapkan masyarakat yang memiliki kondisi memadai dapat berinisiatif membantu yang membutuhkan dan memberikan bantuan tanpa meminta imbalan apapun.
3. Diharapkan kader Desa ikut serta dalam pelaksanaan gadai tanah sawah dan pencatatan hitam putih, sebagai persiapan sidang sengketa di kemudian hari seandainya hal tersebut terjadi.
4. Harapan untuk mensosialisasikan dampak positif dan negatif dari gadai sawah kepada masyarakat.